

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMERATAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA**

(Studi : Di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi syarat Memperoleh Gelar
Administrasi Publik



OLEH

MARTINA MAU

2015210049

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMERATAAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

(Studi di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu)

Martina Mau, Ignastius Adiwidjaja, Asih Widi Lestary, Program Studi
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Tribhuwana Tungadewi Malang
Email : astrymau1991@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu kesenjangan dalam perekonomian adalah ketimpangan ekonomi listrik di setiap daerah, yang meliputi tingkat keuntungan penduduk yang tidak selalu sebrono (sesuai dengan kapita) Penyebabnya adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan struktur desa. Pendekatan eksplorasi pada dasarnya adalah cara metodis untuk membawa data dengan penyebab dan kegunaan tertentu. Berpijak pada keseluruhan eksplorasi yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menggunakan jenis eksplorasi yang bersifat deskriptif kualitatif. Fokus kajian ini adalah: partisipasi masyarakat dan perbaikan infrastruktur desa yang dilakukan di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. dalam penelitian ini, perangkat penelitian adalah peneliti itu sendiri yang didasarkan pada kemampuan peneliti mulai dari perencanaan penelitian sampai dengan tingkat pengolahan informasi penelitian. aset catatan dalam hal ini terlihat pada sumber statistik yang peneliti gunakan adalah melalui sumber lisan/tulisan, sumber foto, aset kata-kata, gerakan langsung. Strategi record series. teknik analisis data adalah cara sistematis mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan subjek, dan dokumentasi, menggunakan organisasi catatan ke dalam pelatihan, memecahnya menjadi gadget, mensintesis, menyusun gaya, dan menarik kesimpulan untuk menjaga kelancarannya. Hasil dari survei tersebut adalah dengan adanya peran serta masyarakat dalam desa melalui memposisikan masyarakat sebagai aktor utama atau masalah pembangunan, maka perangkat Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu membuat kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat khususnya pemberian bantuan kendaraan. ketempat desanya yg inginkan pembiayaan tuk yg dilakukan pembangunan infrastruktur primer. daerah pedesaan yang perlu segera diwujudkan melalui pendanaan kerjasama antar desa dan jaringan yang didukung oleh masyarakat secara terpadu dengan pola gotong royong.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pemerataan Pembangunan, Infrastruktur Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu contoh ketimpangan pembangunan di Indonesia adalah perbaikan terus difokuskan di pulau Jawa yang memiliki banyak fasilitas yang cukup baik termasuk pusat pelatihan dan kebugaran, sedangkan pulau-pulau kecil tidak lagi menikmati peningkatan yang merata, sehingga setiap salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang sulit diperoleh, termasuk fasilitas kesehatan atau pusat pendidikan yang mencakup daerah setempat.

Ketimpang dalam kontrol adalah manifestasi nyata dari titik lemah internal energi yang diharapkan dengan tujuan untuk melakukan tabel waktu pembangunan di seluruh negeri dan bahkan pembangunan daerah.

Pedoman pemerintah harus dibuat manusia-manusia yang berpengalaman agar hal-hal di dalam pembangunan pembangunan infrastruktur yang meliputi sekolah dan kebugaran dapat lebih dirasakan tanpa ditunda-tunda oleh masyarakat. partisipasi jaringan menjadi semakin kritis.

Nampaknya ada instansi atau instansi yang juga tumbuh menjadi alat atau pendekatan untuk memediasi kiprah masyarakat, yang terdiri dari pemerintah. Dalam hal ini, ada baiknya herbal terbaik saat ini yang pemerintah sendiri melihat ini dihitung secara akurat dan dengan konsep yang sesuai.

Pihak berwenang juga harus siap untuk lebih terbuka, bertanggung jawab, dan lebih transparan dalam menghadapi cuaca mutakhir di masyarakat. Berbagai tren pemerataan yang dimiliki dengan bantuan pemerintah pasti sudah semuanya mulai meminta partisipasi masyarakat. karena tanpa bantuan partisipasi jaringan, peningkatan yang dilakukan akan tidak bagus.

Program, implementasi perangkat lunak, dan pembiayaan diselesaikan dengan bantuan Desa, baik itu kegiatan di bidang politik, moneter, dan sosial budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa, secara substantif menempatkan partisipasi sebagai alat yang sangat vital dalam sistem pemerintahan desa dan berguna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki, menjamin, bertugas dan bermasyarakat. memperoleh jaringan aspirasi, dan sebagai kendaraan untuk mengagregasi hobi dan memobilisasi keuangan untuk mengolah dan memperluas potensi desa.

Dalam menumbuhkan keinginan jaringan perlu ada perbaikan, karena perbaikan merupakan proses yang mendekati perubahan yang dapat terus diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ide perbaikan memiliki sarana alokasi bantuan, pemberdayaan jaringan dan regulasi. konsep pembangunan selanjutnya adalah konsep yang serba multidimensi dengan mengacu pada rangkaian sifat dan seluruh aspek kehidupan, yang terdiri dari faktor politik, finansial dan sosial. Perbaikan adalah prosedur multidimensi yang terdiri dari perubahan yang sangat vital di dalam struktur sosial, sikap manusia dan institusi di seluruh negeri serta mempercepat pertumbuhan keuangan, menurunkan ketimpangan, dan mengentaskan kemiskinan (Pasaribu, 2015).

selain memperhatikan unsur keadilan dan pemerataan perbaikan serta hasil, pembangunan juga perlu diorientasikan lebih dekat dengan hiburan masyarakat yang tulus sesuai dengan apa yang diinginkan dan dirasakan melalui mereka. .

Sektor-sektor ekonomi semacam ini adalah kekuatan ekonomi yang tidak merata di setiap wilayah, bersama dengan tingkat keuntungan (per kapita) penduduk yang tidak merata, namun dalam prakteknya aparat sendiri mengalami kendala dalam menegakkan pembangunan infrastruktur desa, mulai dari pembiayaan, di samping perubahan infrastruktur pembangunan yang dirasa kurang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, proses perbaikan infrastruktur desa memerlukan sistem partisipasi jaringan dan peran perangkat desa untuk mencapai pertukaran.

Pembangunan infrastruktur merupakan situasi yang vital dalam pembangunan sehingga tidak lagi memperluas pertanian dan pertanian pedesaan. Isu yang ingin diakui dalam lingkup desa adalah perbaikan desa yang cakupannya sangat luas. Pembangunan pedesaan pada kenyataannya perlu dilakukan agar tidak ada perbedaan antara perbaikan pedesaan dan perbaikan yang konkrit. Dalam perbaikan pedesaan harus ada kerangka kerja yang jelas tentang apa yang akan dilakukan dalam kerangka waktu yang positif selain kesamaan langkah dan langkah untuk perbaikan dan daerah pedesaan (Theresia, 2014).

Partisipasi jaringan juga diperlukan dalam menentukan kebijakan dan pilihan yang mungkin sering disebutkan di berbagai daerah, masing-masing di perkotaan dan pedesaan karena kita dapat melihat pengaruh tertinggi dari partisipasi ini, partisipasi jaringan ini secara jujur menentukan rencana atau paket yang dapat di sekelilingnya, pencapaian sebuah perangkat lunak tanpa partisipasi jaringan sekarang

Prinsip human-focused improvement menekankan bahwa jaringan harus menjadi aktor utama dalam pembangunan. Partisipasi memiliki alasan sederhana sebagai alat yang memberikan kesempatan luar biasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperluas sesuai dengan kapasitas mereka, secara aktif khawatir dalam administrasi pemerintahan, sehingga para pihak dapat menikmati manfaat dari pedoman yang dibuat dengan menggunakan otoritas.

pengembangan kemampuan keuangan terdekat, dan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan saat ini dalam upaya untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan sistem.

Permasalahan yang dihadapi melalui Desa adalah mengenai minimnya peran serta masyarakat dalam produksi sarana prasarana pembangunan Desa karena kurang dimanipulasi tetapi, tanpa penggunaan yang tepat dalam membuat rencana, penempatan niat dan pemantauan, aplikasi apa pun yang sebenarnya akan menjadi bumerang yang paling efektif, paling sederhana dalam bentuk ide tanpa utilitas. Kajian ini sesuai dengan apa yang penulis geluti saat ini, khususnya partisipasi jaringan dalam perbaikan Desa dan menawarkan bukti nyata selain menjadi fasilitator peningkatan ekonomi masyarakat di segala bidang.

Kendala pada penerapan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur di desa pendem kecamatan junrejo kota batu dapat terjadi karena kurangnya partisipasi warga dalam pembangunan Desa. dimana warga kurang kebersamaan untuk menyelesaikan dilema untuk mencapai perbaikan, orang kurang percaya diri

pada kemampuan mereka untuk meningkatkan eksistensi kelas satu dan penduduk yang terlalu puas diri dengan diri mereka sendiri. sehingga perlunya pendekatan perangkat Desa untuk meningkatkan partisipasi jaringan di awal pembangunan desa adalah dengan melakukan sekolah terhadap jaringan baik dari segi sistem keuangan, kebijakan, agama, dan kebugaran, mengunggah sesaji kepada warga dan pembangunan manusia didalamnya. bentuk partisipasi yang diberikan melalui masyarakat beserta pikiran, listrik dan barang/tunai.

Karena partisipasi warga mutlak memilih terpenuhi atau tidaknya perbaikan infrastruktur dan suprastruktur.

Partisipasi publik memiliki banyak bentuk, mulai dari partisipasi publik secara langsung dalam program-program pemerintah dan yang tidak langsung di samping kontribusi ekonomi, kekuatan, pemikiran, dan keluhan atau mungkin penolakan pelaporan yang berwibawa. Hingga saat ini, partisipasi jaringan masih terbatas pada partisipasi dalam pelaksanaan program presiden atau kegiatan olahraga, meskipun partisipasi masyarakat tidak selalu diperlukan pada saat pelaksanaan, tetapi juga dari tahap perencanaan strategis pengambilan pilihan.

Motif pengambilan nama di atas terlihat dari latar belakang permasalahan yang terindeks di dalam permasalahan kuantitas partisipasi jaringan dalam membangun infrastruktur desa. (di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu)

1.2. Rumus Masalah

Berdasarkan sejarah masa lalu kompleksitas di atas, peneliti dapat merumuskan masalah yang akan diteliti, khususnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana partisipasi jaringan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur desa di desa pendem, kecamatan junrejo, kota batu?
- b. Apakah jaringan yang terlibat dalam partisipasi perbaikan infrastruktur desa di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu?

1.3. tujuan penelitian

untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Keuntungan teoritis

1. digunakan untuk menambah keahlian dan keingintahuan selain sebagai referensi bagi pihak lain dari peran serta masyarakat dalam peningkatan infrastruktur yang berkeadilan.
2. perangkat lunak studi manajemen masyarakat umum memberikan perhatian ekstra dan melihat partisipasi jaringan dalam pemerataan infrastruktur Desa.
3. keuntungan know-how dan memberikan kontribusi pikiran yang sangat positif dari berbagai kalangan.

1.4.2. Keuntungan Realistis

1. Dapat mengetahui partisipasi jaringan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur desa di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu dalam berbagai bidang keinginan masyarakat.

2. Dari hasil kajian, partisipasi jaringan dalam keadilan memberikan keuntungan karena mampu menyelesaikan berbagai permasalahan di samping beragam masukan positif yang positif, khususnya Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, untuk senantiasa meningkatkan perbaikan infrastruktur desa.
3. Serta dapat mengetahui seberapa besar partisipasi jaringan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur Desa di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

REFERENCES

- Aprillia Theresia dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat, Dadang Solihin dan Putut Marhayadi, Panduan Lengkap Otonomi Daerah. Bandung, Alfabeta.
- Pasaribu A, F. d. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Susu Sapi Perah* . Di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.: Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan Vol. XVIII No. 1: Mei 2015.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang pada prinsipnya merupakan pelimpahan wewenang pusat ke daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan desa dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa.
- Undang-Undang Pembangunan Desa No. 6 Pasal 78 Ayat 1 Dan 2 Tahun 2014.